

Kinerja Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) di Bawah Kepemimpinan Ibnu Sutowo Tahun 1968-1976

Anas Ghina Mariyatul Qibtiyah ✉ & Ibnu Shodiq

Jurusan Sejarah Universitas Negeri Semarang

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Januari 2023

Disetujui Juni 2023

Dipublikasikan Juli 2023

Keywords:

Kinerja, Pertamina, minyak bumi, Ibnu Sutowo

Abstrak

Tulisan ini membahas mengenai perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara (Pertamina) ketika Ibnu Sutowo menjabat sebagai direktur utama. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja perusahaan Pertamina selama berada di bawah kepemimpinan Ibnu Sutowo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan perusahaan Pertamina sejak pertama kali didirikan hingga pada masa akhir jabatan Ibnu Sutowo dan untuk menjabarkan pengaruh dari gaya kepemimpinan Ibnu Sutowo selama menjabat sebagai direktur utama terhadap kinerja perusahaan Pertamina. Dengan menggunakan metode penelitian sejarah, tulisan ini menghasilkan penemuan bahwa dalam waktu yang relatif singkat, Pertamina telah mengalami pasang surut perusahaan. Di bawah kepemimpinan Ibnu Sutowo, Pertamina berhasil berkembang pesat dan dikenal oleh dunia perminyakan internasional, berkat Ibnu Sutowo, Pertamina dapat menjadi ladang penghasilan dan sumber modal bagi pembangunan negara pada saat itu. Namun dibalik kesuksesannya, Pertamina sempat tertimpa permasalahan serius menyangkut keuangan perusahaan yang selanjutnya kita kenal sebagai Krisis Pertamina tahun 1975.

Abstract

This paper discusses the state oil and gas mining company (Pertamina) when Ibnu Sutowo served as president director. The main problem in this study is how Pertamina's company performed during its time under the leadership of Ibnu Sutowo. The purpose of this study is to find out how Pertamina's company has been managed since it was first established until the end of Ibnu Sutowo's term of office and to describe the influence of Ibnu Sutowo's leadership style during his tenure as president director on Pertamina's company performance. Using historical research methods, this paper resulted in the discovery that in a relatively short period of time, Pertamina has experienced the company's ups and downs. Under the leadership of Ibnu Sutowo, Pertamina managed to develop rapidly and was known by the international petroleum world, thanks to Ibnu Sutowo, Pertamina was able to become an income field and source of capital for the development of the country at that time. But behind its success, Pertamina was hit by serious problems regarding the company's finances which we later know as the Pertamina Crisis in 1975.

© 2023 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:
Ruang Jurnal Sejarah, Gedung C5 Lantai 1 FIS Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

ISSN 2252-6633

PENDAHULUAN

Pada tahun 1973, organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi atau biasa disebut OPEC (*Organization of the Petroleum Exporting Countries*) melakukan embargo minyak terhadap negara-negara yang mendukung Israel dalam perang Yom Kippur (1973). Embargo berupa pemangkasan ekspor minyak bumi yang berimbas pada kenaikan harga ekspor minyak secara drastis dari yang sebelumnya hanya USD 2,96 per barel menjadi USD 12,60 per barel (Ricklefs, 2008: 620). Dengan adanya embargo minyak bumi, negara-negara terdampak embargo kebingungan untuk mendapatkan pasokan minyak untuk keberlangsungan industri yang membutuhkan minyak dalam skala besar. Indonesia sebagai salah satu negara penghasil minyak bumi melihat keadaan krisis minyak yang dialami oleh negara-negara tersebut sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan besar dari penjualan minyak serta kesempatan bagi Pertamina untuk lebih dikenal luas di dunia perminyakan internasional (Goldstone, 1977: 123).

Fenomena embargo berupa pemangkasan ekspor minyak ini selanjutnya disebut sebagai fenomena *Oil Boom I*. Ketika terjadinya fenomena tersebut, Pertamina masih berada di bawah kepemimpinan direktur utama Ibnu Sutowo. Seorang jenderal yang memiliki latar belakang di bidang kesehatan dan baru menekuni dunia perminyakan pada tahun 1945 hingga akhirnya ditunjuk langsung oleh presiden Soeharto untuk memimpin Pertamina (Ramadhan KH, 2008:236). Berkat kerja keras dan kegigihannya dalam mengelola Pertamina dan didukung dengan adanya *Oil Boom I*, Pertamina mampu bangkit dari keadaan yang serba terbatas baik dari segi modal maupun operasional, menjadi perusahaan negara produsen minyak bumi terbesar ke-11 di dunia (Coggin, 1975).

Kesuksesan Pertamina dalam memanfaatkan situasi perminyakan dunia pada saat itu, membawa berkah tersendiri bagi pembangunan ekonomi yang sedang berjalan. Naiknya harga minyak sebesar empat kali lipat dari harga normal dan meningkatnya permintaan ekspor minyak bumi telah menjadikan minyak sebagai salah satu barang tambang paling

menjanjikan di antara barang tambang lainnya di Indonesia. Minyak memegang peranan penting dalam lancarnya program-program pembangunan serta perbaikan di segala aspek. Khususnya selama Ibnu Sutowo memimpin sebagai direktur utama, Pertamina banyak mengeluarkan dana untuk membantu pendirian berbagai fasilitas (TIME, 1970). Akan tetapi, keputusan Ibnu Sutowo untuk mengalirkan dana pemasukan Pertamina kepada pembangunan-pembangunan tersebut dianggap terlalu berlebihan di kemudian hari. Hingga akhirnya diketahui bahwa Pertamina juga telah memperluas bidang usahanya ke bidang-bidang di luar perminyakan. Bidang-bidang usaha tersebut diantaranya adalah pendirian maskapai penerbangan, pendirian restoran Indonesia di New York, pengadaan kapal tanker melalui broker, dan hingga pendirian maskapai asuransi di Hongkong. Keseluruhan proyek-proyek ekspansi Pertamina tersebut diputuskan dan dilakukan oleh Ibnu Sutowo sendiri (Ramadhan KH, 2008: 257).

Keadaan semakin memburuk setelah terungkap bahwa Pertamina juga telah mengalami penumpukan utang luar negeri dan gagal untuk membayar utang-utang jangka pendek yang jatuh tempo (*Het Parool*, 1976: 25). Situasi ini kemudian secara perlahan mengantarkan Pertamina menuju kejatuhan dan hampir bangkrut karena menanggung utang-utang yang terlalu besar melebihi pendapatan minyak Pertamina maupun pendapatan penghasilan negara pada saat itu. Situasi yang kedepannya lebih sering disebut sebagai Krisis Pertamina.

Penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai perusahaan Pertamina pada saat Ibnu Sutowo memimpin sebagai direktur utama. Bagaimana cara Ibnu Sutowo mengelola perusahaan minyak negara ini dan hasil yang dicapainya selama menjadi direktur utama Pertamina selama kurang lebih delapan tahun lamanya. Serta dampak apa saja yang telah diberikan Ibnu Sutowo sepanjang kinerjanya di Pertamina sejak tahun 1968 hingga tahun 1976.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yang terdiri dari: Pemilihan Topik; Heuristik; Verifikasi; Interpretasi; dan Historiografi (Kuntowijoyo, 2013: 69). Sumber yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer didapatkan dari surat-surat kabar dan majalah yang sezaman dan menyajikan informasi mengenai topik yang akan dibahas. Sedangkan sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku dan artikel jurnal yang diperoleh dari perpustakaan maupun layanan penyedia buku dan jurnal online di internet.

HASIL PENELITIAN

Pertamina dan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia

Minyak bumi merupakan salah satu sektor pertambangan Indonesia yang memikul peranan penting bagi jalannya perekonomian negara. Sebagai salah satu negara penghasil minyak bumi, pertambangan minyak di Indonesia juga merupakan yang tertua di dunia. Bermula pada tahun 1883, seorang pengusaha sekaligus inspektur perkebunan pemerintah Belanda bernama Aeilko Janszoon Zijlker menemukan sumber cadangan minyak di Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Yuwono, 2014: 20). Lahan tambang tersebut kemudian diambil alih dan dikelola oleh sebuah perusahaan minyak milik Belanda bernama *Koninklijke Nederlandsch Indie Maatschappij tot Exploitatie van Petroleum-bronnen in Nederlandsch Indie* (Kartodirdjo, 1975: 197).

Seiring berjalannya waktu, Indonesia akhirnya berhasil memperoleh kemerdekaan dan terbebas dari belenggu penjajahan. Minyak yang sedari awal sudah menjadi barang penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia tak pernah luput dari perhatian. Satu persatu usaha dilakukan untuk mengambil alih seluruh lahan tambang yang sebelumnya dikelola oleh pihak Belanda maupun Jepang. Kala itu terbentuklah sebuah perserikatan bernama Laskar Buruh Minyak (LBM) yang memperjuangkan lahan-lahan tambang minyak di Sumatera Utara untuk

dikelola oleh bangsa Indonesia sendiri. Hingga pada bulan September 1945, tepat satu tahun setelah Indonesia Merdeka, didirikanlah perusahaan minyak di Sumatera Utara bernama PTMNRI (Ismail, 1997: 89). Kemudian mulai bermunculan perusahaan-perusahaan minyak lainnya seperti Permiri di Sumatera Selatan dan PTMN di Jawa Tengah.

Pertamina memiliki sejarah tersendiri yang terpisah dari awal mula berdirinya perusahaan perminyakan negara pertama. Akan tetapi dapat dikatakan bahwa masih terdapat keterkaitan di antara keduanya. Pertamina merupakan sebuah perusahaan yang bermula dari sebuah organisasi atau badan bernama TMSU (Tambang Minyak Sumatera Utara) yang mengelola lahan tambang di Pangkalan Brandan, Sumatera Utara. Setelah dikeluarkannya keputusan pemerintah mengenai status kepemilikan lahan tambang yang diberikan kepada KSAD Kolonel A.H Nasution, didirikanlah sebuah perusahaan minyak bernama PT ETMSU (Karma, 1979: 182). Tidak berselang lama, nama PT ETMSU kemudian diganti menjadi PT Permina agar dapat mewakili dan menyiratkan bahwa ini adalah perusahaan negara.

Pada tahun 1960, presiden mengeluarkan UU No. 44/Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, yang ditujukan khusus untuk mengatur aktivitas pertambangan minyak di Indonesia (Ramadhan KH, 2008: 207). Setelah disahkannya UU tersebut, mulai bermunculan perusahaan minyak berskala kecil seperti PN Pertamina yang sebelumnya adalah PN Permino, PN Permigan yang didirikan untuk memenuhi tuntutan PKI yang pada saat itu masih tersebar di Jawa (Ismail, 1997: 152). Selain itu, PT Pertamina juga mengalami perubahan status dari PT menjadi PN Permina.

Atas dasar efisiensi dan efektifitas, dilakukan merger antara PN Pertamina dan PN Permina pada tahun 1968, untuk meminimalisir terjadinya dualisme dalam pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia menjadi PN Pertamina (*Algemeen Handelsblad*, 1968: 19). Presiden Soeharto menunjuk langsung Ibnu Sutowo, yang sebelumnya merupakan pemimpin

PN Permina untuk menjadi direktur utama PN Pertamina (Ramadhan KH, 2008: 236).

Ibnu Sutowo dan Pertamina

Ibnu Sutowo adalah seseorang yang memiliki latar belakang di bidang kesehatan dan kemiliteran. Seorang dokter yang bertugas di daerah pemukiman transmigran Jawa di Martapura, Sumatera Selatan. Bermula dari penempatannya di Sumatera, Ibnu Sutowo mulai merambatkan karirnya pada bidang militer sejak Ia ditunjuk sebagai kepala djawatan kesehatan tentara Sumatera Selatan dengan pangkat Mayor Tituler. Karirnya di bidang militer terus meningkat hingga Ia diberi kepercayaan untuk menjadi kepala staf sub komando Angkatan Darat oleh KSAD AH Nasution (Karma, 1979: 137).

Ketika KSAD AH Nasution dilimpahi tanggung jawab untuk mengelola lahan tambang di Pangkalan Brandan yang sebelumnya dikelola oleh TMSU dan mendirikan perusahaan minyak PN Permina, Ibnu Sutowo dipercaya untuk memimpin dan memegang kendali tertinggi atas PN Permina. Ibnu Sutowo yang tidak memiliki latar belakang di bidang pertambangan minyak, berusaha menyesuaikan diri dan mulai berusaha untuk mengelola perusahaan yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik mungkin.

Ketika pertama kali didirikannya PT Pertamina, keadaan kilang minyak di Sumatera Utara pada saat itu masih sangat memprihatinkan. Ibnu Sutowo membutuhkan modal yang cukup besar untuk memperbaiki kilang-kilang minyak yang rusak karena telah lama terbengkalai dan atau bekas dampak dari usaha pengambilalihan lahan tambang dari tangan asing. Di tengah kesulitan dan kekeringan modal, Ibnu Sutowo menemukan satu badan yang bersedia menawarkan bantuan bagi Pertamina bernama Kobayashi Group (Ramadhan KH, 2008: 181). PN Permina kemudian berhasil menerima bantuan kredit sebesar USD 53 juta dalam bentuk peralatan dan mesin-mesin yang dibutuhkan untuk kegiatan pertambangan minyak (*Arnhemsche Courant*, 1959). Bantuan kredit tersebut akan dikembalikan kepada Jepang dalam bentuk hasil tambang baik minyak mentah maupun produk-

produk minyak dalam jangka waktu 10 tahun (*Limburgsch Dagblad*. 1960).

Setelah berhasilnya kerjasama pertama kali PN Permina dengan Jepang. Ibnu Sutowo menciptakan suatu sistem kerja sama bagi hasil yang kemudian disebut sebagai *Production Sharing Contract*, yakni sistem kerja sama antara negara pemilik modal dengan negara pemilik hasil bumi yang meletakkan sebagian besar kuasa pengelolaan tambang kepada tuan rumah sehingga menciptakan suatu mekanisme kerja sama yang menguntungkan kedua belah pihak (Karma, 1979). Melalui *Production Sharing Contract* ini, Ibnu Sutowo dengan percaya diri membawa perminyakan Indonesia untuk lebih dikenal di dunia perminyakan internasional.

Kinerja Pertamina di Bawah Ibnu Sutowo

Selama berada dalam kendali Ibnu Sutowo sebagai direktur utama. Pertamina telah mengalami berbagai peningkatan yang cukup signifikan. Khususnya ketika terjadi *Oil Boom I* pada tahun 1973/1974, yang turut memberikan dampak positif bagi pertambangan minyak Indonesia. Pemangkasan ekspor oleh OPEC telah membuat negara-negara terdampak embargo mencari cara untuk tetap dapat memperoleh pasokan minyak bumi demi keberlangsungan industri maupun kebutuhan lainnya. Hal ini yang menjadikan Pertamina akhirnya dapat meraih keuntungan besar dengan adanya peningkatan permintaan ekspor minyak kepada negara-negara yang terdampak embargo. Nilai ekspor minyak Indonesia meningkat tajam dari 30% sejak tahun 1966 menjadi 74. Dengan permintaan minyak yang meningkat pesat dan ditambah kenaikan drastis harga minyak sebanyak empat kali lipat dari harga normal, membuat Pertamina begitu berjasa bagi jalannya pembangunan perekonomian negara. Pertamina tercatat telah menyumbang sebesar 72% untuk pengeluaran dan pembiayaan pembangunan yang sedang berlangsung pada saat itu (Ricklefs, 2008: 620).

Tabel 1
Produksi dan Ekspor Minyak Mentah tahun 1969-1976 (dalam juta barel)

Tahun	Produksi	Volume Ekspor
Repelita I		
1969/1970	284,0	241,3
1970/1971	324,2	267,1
1971/1972	341,5	287,7
1972/1973	412,3	359,7
1973/1974	508,4	439,1
Repelita II		
1974/1975	485,5	406,9
1975/1976	235,8 ⁽¹⁾	166,6 ⁽²⁾

Keterangan:
⁽¹⁾ Sampai dengan September 1975
⁽²⁾ Sampai dengan Agustus 1975

(Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 1976/1977)

Dari data tabel di atas, dapat kita lihat bahwa produksi dan ekspor minyak mentah terus meningkat dari tahun ke tahun. Berkat *Oil Boom I*, Pertamina makin dikenal oleh dunia hingga berhasil memperluas jangkauan ekspor minyaknya. Demikian halnya juga turut berpengaruh pada sedikit menurunnya produksi dan ekspor minyak mentah pada tahun 1974, meskipun terjadi penurunan, karena harga ekspor minyak sedang tinggi, maka Pertamina tetap dapat memperoleh keuntungan yang maksimal dari penjualan minyak luar negeri.

Pendapatan negara yang berasal dari ekspor juga terus meningkat dan minyak mendominasi sebagian besar pendapatan tersebut. Peningkatan terbesar terjadi antara tahun 1973 hingga 1975, pemasukan ekspor *Free on Board* dengan persentase kenaikan sebesar 49,7% dan di dalamnya, ekspor minyak menyumbang rata-rata 50% hingga 75% dari total keseluruhan pendapatan ekspor (Bappenas, 1978: 224).

Dengan berkah minyak yang melimpah berkat adanya *Oil Boom I*, keuntungan Pertamina semakin berlipat ganda dengan diterapkannya sistem *Production Sharing Contract* yang mengatur sistem bagi hasil antara Indonesia sebagai tuan rumah dengan pihak asing yang menanamkan modalnya di Indonesia.

Tabel 2
Permisalan Aturan *Production Sharing Contract*

Perihal	Angka
Production Sharing Contract (PSC) menghasilkan	100x
Modal yang dikeluarkan	40x (maks.)
Penghasilan bersih (net)	60x
Yang harus disetor ke kas negara (pajak)	60% dari 60x = 36x
Sisa keuntungan bersih	60x - 36x = 24x

Keterangan:

- x adalah permisalan satuan/ukuran (ton/barel/juta/milyar)
- maks.: Maksimal

(Sumber: Penjelasan Pasal 14 Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 tentang Pertamina)

Dari tabel permisalan pembagian hasil *Production Sharing Contract* di atas, dapat diketahui bahwa ketika dalam satu periode produksi menghasilkan 100x, maka kontraktor atau pihak pemilik modal harus menyisihkan modal maksimal 40x untuk pelaksanaan produksi selanjutnya. Kemudian sisa penghasilan 60x dipotong pajak sebesar 60% yang diserahkan kepada negara (36x). Sisa penghasilan bersih setelah dipotong modal dan kewajiban pajak inilah (24x) yang nantinya dibagi kedua belah pihak. (Perjanjian pembagian hasil produksi adalah 65:35). Dengan skema pembagian hasil kerjasama sedemikian rupa, secara otomatis posisi Indonesia sebagai tuan rumah lebih diuntungkan. Sebagaimana tujuan dari diadakannya *Production Sharing Contract* adalah agar Indonesia sebagai tuan rumah dapat memaksimalkan pendapatan negara dari minyak (UU No. 8 Tahun 1971).

Pertamina ketika berada di bawah kepemimpinan Ibnu Sutowo, dapat dirasakan begitu nyata berperan sebagai salah satu perusahaan negara penopang sebagian besar pelaksanaan program pembangunan pemerintah. Dengan perkembangan yang demikian pesat di bawah kepemimpinan direktur utama Ibnu Sutowo, pemerintah Indonesia menaruh harapan yang begitu besar terhadap Pertamina. Secara perlahan tapi pasti, minyak menjadi salah satu sektor pertambangan yang paling menjanjikan dan diharapkan dapat terus menyokong gerak laju pertumbuhan perekonomian Indonesia. Begitu berkembang pesatnya Pertamina pada saat itu, hingga ketika mendengar mengenai adanya kemajuan, perbaikan atau pembangunan

di suatu daerah di Indonesia, maka dapat dipastikan bahwa Pertamina telah ikut andil di dalamnya sebagai inisiator maupun penyumbang dana pembangunan (NRC Handelsblad, 1974: 6).

Krisis Pertamina

Meskipun Ibnu Sutowo yang telah menjabat sebagai direktur utama Pertamina selama kurang lebih 8 tahun lamanya dan telah memberikan banyak sumbangsih bagi perkembangan dan kemajuan Pertamina seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Tidak lantas dapat menggugurkan dugaan-dugaan yang telah dilayangkan kepada Pertamina terkait dengan ekspansi berlebihan, penumpukan utang serta penggelapan pendapatan minyak yang diperoleh Pertamina. Begitu pula dengan dampak yang dialami oleh Indonesia sebagai akibat dari terjadinya krisis Pertamina tahun 1974-1975 yang tidak dapat terhindarkan.

Pada tahun 1974, terungkap bahwa Pertamina telah menumpuk utang luar negeri sebesar Usd 3,5 milyar (*Leeuwarder Courant*, 1976). Kemudian pada bulan Maret 1975, Pertamina mengalami kegagalan pembayaran utang luar negeri jangka pendek yang telah jatuh tempo sebesar USD 1,5 milyar (Glassburner, 1976: 1103). Seiring berjalannya waktu, utang Pertamina terus menumpuk hingga pada bulan Juni 1975, diketahui telah bertambah sebesar USD 3.4 miliar (Goldstone, 1977: 122). Puncaknya pada bulan Februari 1976, total utang luar negeri Pertamina telah membengkak menjadi USD 10 miliar (*The New York Times*, 1976). Dengan lingkaran utang luar negeri yang terus menumpuk dan menutup citra baik Pertamina di mata dunia, berbagai lembaga peminjaman dan bank-bank dunia yang turut memberikan utang kepada Pertamina beramai-ramai menagih hutang meskipun belum jatuh tempo (Khasali, 2008: 71). Mereka khawatir apabila ini adalah saat-saat dimana Pertamina akan mengalami kebangkrutan.

Utang-utang luar negeri dengan mengatasnamakan Pertamina tersebut tidak lain digunakan Ibnu Sutowo untuk membiayai proyek-proyek ekspansi Pertamina yang sebagian besar tidak memiliki kaitan dengan kegiatan pertambangan. Ibnu Sutowo pada saat itu

mengandalkan derasnya arus kas Pertamina yang pada saat itu sedang menikmati berkah *Oil Boom I* untuk menerima pinjaman luar negeri. Proyek-proyek tersebut antara lain yaitu proyek pembangunan kembali pabrik baja *Krakatau Steel* di Jawa Barat; Pendirian sebuah perusahaan asuransi *Tugu Insurance* di Hongkong; Pendirian Restoran Indonesia *Ramayana* di New York; Pendirian maskapai penerbangan *Pelita*; Pengadaan kapal tanker melalui broker dan masih banyak lagi proyek-proyek ekspansi lainnya di berbagai bidang.

Ibnu Sutowo berpendapat bahwa selain dilakukan untuk kepentingan Pertamina sendiri, juga didorong oleh situasi negara pada saat itu yang menurutnya belum ada orang lain yang mengambil tanggung jawab untuk menangani beberapa proyek tersebut sehingga Pertamina melakukannya sendiri demi tetap berjalannya pembangunan (Ramadhan KH, 2008: 257). Akan tetapi, apa yang telah dilakukan Ibnu Sutowo terhadap Pertamina menjadi bumerang tersendiri bagi perusahaan, dan bahkan bagi negara. Permasalahan utang luar negeri dan perluasan bidang usaha yang tidak relevan dengan kegiatan pertambangan telah memukul mundur Pertamina yang pada saat itu sedang dalam masa kejayaan dimana berkah minyak yang melimpah ruah turut meningkatkan pendapatan perusahaan. Situasi yang menimpa Pertamina inilah yang disebut sebagai krisis Pertamina.

Dampak Krisis Pertamina

Krisis yang dialami Pertamina telah memberikan dampak yang cukup signifikan bagi situasi perekonomian Indonesia pada saat itu. Beberapa dampak tersebut diantaranya:

1. Merusak reputasi Indonesia di dunia internasional.

Akibat utang Pertamina yang menumpuk dan kegagalan dalam melunasi utang-utang tersebut membuat pemerintah Indonesia terpaksa mengambil alih tanggung jawab pembayaran. Melalui menteri pertambangan Indonesia pada saat itu, Mohammad Sadli. Indonesia menyatakan akan menanggung semua kewajiban utang Pertamina baik jangka pendek maupun jangka panjang (NRC

Handelsblad, 1975: 15). Hal ini dilakukan dengan harapan bahwa Pertamina dapat segera memperbaiki keadaan dan mengurangi citra buruk di dunia internasional.

Akan tetapi, berita mengenai Pertamina yang hampir mengalami kejatuhan dan bangkrut akibat kegagalan pembayaran utang luar negeri yang begitu besar dengan cepat tersebar dan terdengar di telinga para kreditur-kreditur Pertamina. Media-media berita luar negeri seperti *The New York Times* (Amerika Serikat) dan sebagian kecil surat kabar Belanda seperti *Algemeen Handelsblad*, *Het Parool*, *NRC Handelsblad*, *De Telegraaf* dan sebagainya, ramai memuat berita mengenai Pertamina dan permasalahan krisis akibat utang yang melilitnya.

Dengan gencarnya media asing yang memberitakan mengenai kesulitan yang sedang dihadapi oleh Pertamina. semakin membuat pemerintah mengalami kesulitan untuk mengendalikan pemberitaan mengenai krisis Pertamina karena hal ini secara langsung berdampak pada reputasi Indonesia di mata dunia internasional, yang menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan para lembaga kreditur maupun bank-bank asing di dunia untuk memberikan pinjaman kepada Indonesia (*The New York Times*, 1977).

2. Mempengaruhi neraca pembayaran dan cadangan devisa negara.

Jumlah keseluruhan utang Pertamina adalah sebesar USD 10 miliar yang terdiri dari pinjaman jangka panjang dan jangka pendek. Jumlah tersebut melebihi pendapatan pemasukan tahunan dalam negeri pada saat itu yang tak pernah lebih dari USD 6 miliar (Kompas, 2001). Pemasukan devisa negara yang sempat mencapai surplus pada tahun 1973/1974 sebesar USD 549 juta mengalami penurunan hingga terjadi defisit sebesar USD 97 juta dalam tahun 1974/1975. Penurunan

yang terjadi dalam waktu yang relatif singkat tersebut merupakan dampak dari adanya krisis Pertamina. Pemerintah tercatat melakukan pengeluaran devisa negara sebesar USD 735 juta untuk melunasi utang-utang jangka pendek Pertamina pada luar negeri (Laporan Bappenas, 1975).

Pada tahun ekonomi 1975/1976, pemerintah menerima pinjaman tunai luar negeri sebesar USD 1,04 milyar yang digunakan untuk membayar utang-utang Pertamina yang pada saat itu sedang dalam masa krisis. Selain itu pinjaman tunai juga digunakan untuk menormalkan ketersediaan devisa negara yang menurun drastis karena digunakan untuk membayar utang-utang Pertamina. Dengan adanya pinjaman tunai tersebut, turut memberatkan posisi neraca pembayaran Indonesia.

3. Menghambat pembangunan yang sedang berjalan.

Ketika akhirnya terungkap bahwa Pertamina telah menimbun utang luar negeri dan mengalami kegagalan untuk membayarnya, perkembangan pemerintah dalam pembangunan nasional yang sedang berjalan pada saat itu secara otomatis terhambat, tak terkecuali sektor pertambangan minyak yang merupakan bidang yang dibawah langsung oleh Pertamina. Fokus pemerintah teralihkan pada krisis Pertamina yang tidak hanya merupakan urusan dalam negeri saja, melainkan telah menjadi urusan dunia perminyakan Internasional.

SIMPULAN

Selama berada di bawah kepemimpinan Ibnu Sutowo. Pertamina telah mengalami banyak perkembangan. Ibnu Sutowo selalu memiliki cara tersendiri dalam mengelola perusahaan yang dipercayakan kepadanya. Di tangan Ibnu Sutowo, Pertamina bahkan sempat menjadi perusahaan minyak terbesar ke-11 di dunia. Pada tahun 1974, Pertamina disambut

dengan booming minyak yang menyebabkan naiknya harga minyak dunia. Setelah menolak untuk bergabung dengan OPEC dan memilih untuk menjual persediaan minyak kepada negara-negara yang terdampak embargo, Indonesia akhirnya dapat merasakan dampak positif dari adanya embargo minyak akibat Oil Boom I. Pertamina berhasil memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin hingga akhirnya meningkatkan pendapatan pemasukan penjualan minyak.

Meskipun sepak terjang Ibnu Sutowo di dunia perminyakan, khususnya di Pertamina sangat nyata telah memberikan banyak peningkatan, tetap tidak dapat menghindari bencana keuangan yang pada akhir tahun 1974 dialami oleh Pertamina. Belum terhitung cukup lama setelah Oil Boom I meletus, Pertamina mengalami krisis yang disebabkan oleh kegagalan dan penumpukan utang luar negeri hingga membuat Pertamina hampir bangkrut. Krisis Pertamina tahun 1974-1976 ini sekaligus menandai berakhirnya jabatan direktur utama yang dipegang Ibnu Sutowo selama kurang lebih 8 tahun lamanya.

DAFTAR PUSTAKA

Surat Kabar

- Algemeen Handelsblad. 7 Juni 1968. *Indonesische Olie-mijnen Samengevoegd*.
- Arnhemsche Courant. 4 April 1959. *Exploitatie olie terreinen op Sumatra door Japanners*.
- Harian Kompas. 13 Januari 2001. *Mozaik Perjalanan Ibnu Sutowo*.
- Het Parool. 25 Maret 1976. *Schuld Indonesisch Staatsoliebedrijf nu 10 miljard dollar*.
- Leuwarder Courant. 5 Maret 1976. *Soetowo moest Pertamina verlaten. Machtige Oliebaas Struikelde Over Miljardenschuld*.
- Limburgsch Dagblad. 20 Januari 1960. *Olie-Exploitatie door Indonesie-zelf*.

NRC Handelsblad. 19 Agustus 1974. *Oliewinst van Pertamina fleurt Indonesie op*.

NRC Handelsblad. 29 Maret 1975. *Pertamina Zit Zwar In De Schulden*.

NRC Handelsblad. 10 April 1975. *Miljardenproject op Indonesisch eiland Batam*.

Buku

- Ismail, T., A. R. M., & Jabbar, H. (1997). *Pertamina: Dari Puing-Puing ke Masa Depan. Refleksi dan Visi*. Humas Pertamina.
- Karma, M. (1979). *Ibnu Sutowo Pelopor Sistem Bagi Hasil di Bidang Perminyakan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Kartodirjo, S., Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (2008). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid 5*. Jakarta: Balai Pustaka.
- KH, R. (2008). *Ibnu Sutowo: Saatnya Saya Bercerita*. Jakarta: National Press Club of Indonesia (NPCI).
- Khasali, R. (2008). *Mutasi DNA Powerhouse: Pertamina on The Move*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tata Wacana.
- Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Yuwono, I. D. (2014). *Mafia Migas vs Pertamina*. Yogyakarta: Galang Pustaka.

Jurnal

- Glassburner, Bruce. (1976). In The Wake of General Ibnu: Crisis in the Indonesian Oil Industry. *Asian Survey*. 16(12), 1099-1112.
- Goldstone, Anthony. (1977). What was the Pertamina Crisis? *Southeast Asian Journal*. 122-132.

“Indonesia: Attack on Corruption”. Majalah TIME. 31 Agustus 1970.

Terbitan Pemerintah

Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara

Majalah

“Scandals: Bitter Rijsttafel”. Majalah TIME. 14 Februari 1977.

Website

<https://www.nytimes.com>

Lain-Lain

Laporan Bappenas Tahun 1975 Bab 4: Neraca Pembayaran dan Perdagangan Luar Negeri.

Laporan Bappenas Tahun 1978 Bab 4: Neraca Pembayaran dan Perdagangan Luar Negeri.